

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alenia IV Pembukaan UUD 1945, Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (**Undang-Undang Dasar, 1945**).

Dalam otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001, seiring dengan diberlakukannya paket undan-undang otonomi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan luas bagi tiap Kota atau Kabupaten untuk mencari, mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Daerah juga memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang dimulai dari penyusunan rencana pembangunan hingga pemanfaatan dan pengelola potensi sumberdaya lokal yang dimilikinya. Konsekuensi logis lainnya yang harus ditanggung oleh daerah yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pusat kedaerah menjadikan daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kemajuan atau kemunduran daerahnya.

Daerah dianggap lebih mengetahui potensi-potensi apa saja yang dimilikinya untuk dikembangkan dan juga lebih mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakatnya untuk diadopsi dalam pembangunan sehingga pembangunan pun berjalan tepat sasaran dan tujuan pun bisa dicapai secara optimal. Berhasil atau tidaknya pembangunan akan bergantung pada kemampuan

pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mengelola keuangan daerah dan melaksanakan strategi pembangunan daerahnya. Dengan demikian, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam pembangunan daerah agar pembangunan bisa dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan dan juga pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Samuelson (1955) mengemukakan bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam mampu karena sektor itu memiliki keunggulan komparatif (*competitive advantage*) untuk dikembangkan. Sektor dikatakan memiliki potensi besar jika mampu memberikan nilai tambah yang relatif besar bagi perekonomian suatu wilayah. Dapat dikembangkan dengan cepat maksudnya meskipun sektor tersebut dikembangkan dengan modal yang besarnya sama dan dalam jangka waktu yang sama pula, akan tetapi memiliki produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Perkembangan pada sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. (**Tarigan, 2005**)

Konsep di atas juga sejalan dengan konsep pertumbuhan tidak berimbang yang dikemukakan oleh Prof A. O. Hirschman bahwa investasi pada industri atau sektor perekonomian yang strategis dan potensial akan membuka peluang investasi baru dan jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Tentunya dengan catatan sektor strategis dan potensial tersebut harus memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain sehingga akan terjadi pertumbuhan menjalar dari sektor-sektor ekonomi utama ke sektor ekonomi pendukungnya, dari industri yang satu ke industri lainnya, dari perusahaan yang satu ke perusahaan lainnya. Akan tetapi jika sektor yang dimaksud Hirschman tidak memiliki keterkaitan tinggi

terhadap, maka sektor tersebut cenderung *Footloose*, yaitu mudah beralih dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya (Jhingan, 2012).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah lebih ditujukan pada urusan peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. (Arsyad, 2010)

Pertumbuhan ekonomi tersebut, akan terlihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau indeks harga konsumen secara berkala, yaitu pertumbuhan yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif akan menunjukkan penurunan perekonomian.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal yang mampu mendorong kegiatan ekonominya.

Kabupaten Bangka Selatan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih dalam menyelenggarakan pemerintahannya, serta memberikan peran kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus mampu melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakatnya, serta harus mampu mengidentifikasi sub sektor ekonomi potensial apa saja yang ada dan dapat dikembangkan untuk dijadikan sebagai lokomotif percepatan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006-2010 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bangka Selatan dengan migas maupun tanpa migas menghasilkan nilai yang sama karena di Kabupaten Bangka Selatan tidak menghasilkan migas,

yaitu sebesar 1.191.662 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga konstan dengan migas dan tanpa migas sebesar 1.122.970 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 3,83 persen.

Sedangkan dilihat dari distribusi persentase persektor, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bangka Selatan sangat dominan yakni sebesar 48,31 persen, sedangkan kontribusi dominan berikutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,18 persen dan terakhir dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,73 persen.

Sementara dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 bahwa Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan tingkat PDRB perkapita yang rendah dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2010, PDRB perkapita atas dasar berlaku Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten dengan nilai terendah bila dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 16.508. 431. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar konstan Kabupaten Bangka Selatan pada tahun yang sama juga merupakan kabupaten dengan peringkat paling rendah yaitu dengan nilai sebesar Rp 6.939.944. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel I.1** berikut.

Tabel I.1
PDRB Perkapita
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita ADHB (dalam Rupiah)	PDRB Perkapita ADHK (dalam Rupiah)
Pulau Bangka			
1.	Kab. Bangka	17.208.134	7.318.094
2.	Kab. Bangka Barat	36.385.683	15.155.613
3.	Kab. Bangka Tengah	20.452.311	8.053.236
4.	Kab. Bangka Selatan	16.508.431	6.939.944
5.	Kota Pangkalpinang	18.614.254	7.418.642

No.	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita ADHB (dalam Rupiah)	PDRB Perkapita ADHK (dalam Rupiah)
Pulau Belitung			
6.	Kab. Belitung	18.622.713	7.989.009
7.	Kab. Belitung Timur	22.313.472	8.321.317

Sumber : PDRB Prov. Kep. Bangka Belitung, 2011

Dari penjelasan diatas, bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dan sangat berdampak positif bagi perekonomian Kabupaten Bangka Selatan. Namun, berdasarkan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Selatan baik ATHB maupun ATHK merupakan kabupaten terendah dari pendapatan rata-rata penduduk pertahun dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Hal ini dapat memberikan pengertian bahwa kabupaten bangka selatan merupakan kabupaten dengan tingkat kemakmuran masyarakat yang relatif rendah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang akhirnya berdampak bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Bangka Selatan, dirasakan perlu untuk mengetahui sektor apa saja yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Namun pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan tidak memungkinkan untuk bisa mengembangkan seluruh sektor yang dimiliki secara bersama-sama, disamping keterbatasan sumberdaya alam, keterbatasan sumberdaya manusia juga keterbatasan dana untuk mengembangkan. Sektor yang dipilih tentunya sektor ekonomi yang potensial sehingga layak untuk dikembangkan, dengan berkembangnya sektor ekonomi potensial akan mampu mendorong sektor atau sub-sektor lainnya untuk berkembang dan diharapkan mampu menjadi leader pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk memahami sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan, diperlukan suatu studi yang bertujuan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi apa saja yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Bangka Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka permasalahan utama yang dapat dirumuskan yaitu belum teridentifikasinya sektor ekonomi yang menjadi prioritas pengembangan untuk dijadikan leader pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangka Selatan khususnya dalam posisi kabupaten hasil pemekaran. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi ditiap kecamatan berdasarkan sektor ekonomi potensial Kabupaten Bangka Selatan sehingga dapat memacu pertumbuhan wilayah dan setara dengan kabupaten/kota lain di Prov. Kep. Bangka Belitung.

Dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Bangka Selatan, tidak mungkin apabila kebijakan yang diambil adalah dengan memprioritaskan seluruh sektor perekonomian yang ada, karena adanya keterbatasan di Kabupaten Bangka Selatan baik keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, maupun keterbatasan dana untuk mengembangkan. Dengan demikian maka diperlukan suatu analisis mengenai penentuan sektor apa saja yang merupakan sektor ekonomi potensial yang mampu menjadi penggerak perekonomian dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Bangka Selatan, tentunya sektor tersebut yang potensial dan mampu memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka studi ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan : **Sektor apa saja yang potensial untuk dikembangkan menurut analisis penentuan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan?**

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah penentuan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan kriteria sektor ekonomi potensial.
2. Teridentifikasinya sebaran prioritas pengembangan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Bahasan dalam ruang lingkup studi ini meliputi ruang lingkup wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan wilayah penelitian studi dan ruang lingkup materi yang mencakup hal-hal yang menjadi pokok kajian dari studi ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka Selatan terletak di bagian Selatan Pulau Bangka. Dimana secara administratif Wilayah Kabupaten Bangka Selatan mempunyai luas $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$ yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Lepar Pongok, Tukak Sadai dan Pulau Besar. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

- Utara : Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
- Barat dan Selatan : Selat Bangka
- Timur : Selat Gaspar

Gambar 1.1
Peta Orientasi Wilayah Kajian

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, studi ini memiliki ruang lingkup materi berupa studi penentuan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan, oleh karena itu pembahasannya akan dibatasi hanya pada analisis penentuan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan tanpa melihat persaingan terhadap wilayah lainnya.

Untuk menentukan sektor ekonomi potensial dalam penelitian ini, digunakan beberapa kriteria, antara lain:

- Merupakan sektor ekonomi yang kontribusi dan pertumbuhannya relatif lebih menonjol.
- Merupakan sektor ekonomi basis, yaitu sektor ekonomi yang telah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sehingga surplus yang dapat dijual (diekspor) ke luar wilayah.
- Merupakan sektor ekonomi dengan kemampuan kompetitif dan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang lebih besar.
- Merupakan sektor ekonomi yang memberikan *trickling down effect* (efek pengganda) bagi sektor lain, sehingga mampu menggerakkan sektor lain untuk turut berkembang.
- Merupakan sektor ekonomi dengan tingkat produktifitas lahan yang tinggi.

Untuk menentukan sektor potensial yang sesuai, digunakan metode yang bersifat kuantitatif dengan indikator yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE), analisis kontribusi, analisis Location Quatient (LQ), Analisis Shiftshare, analisis Multiplier Effect, dan analisis produktivitas lahan.

Untuk memperoleh sektor potensial yang sesuai dengan kriteria penelitian yang ditetapkan, kriteria kemudian diturunkan kedalam beberapa parameter. Sektor potensial adalah sektor yang memenuhi parameter sebagai berikut:

- Memberikan kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB relatif tinggi. (Diatas rata-rata Prov. Kep. Bangka Belitung)
- Memiliki nilai $LQ > 1$.

- Memiliki nilai (*propotional shift*) dan (*diferential shift*) dengan nilai positif (+).
- Memiliki nilai multiplier effect yang positif (+).
- Nilai produktifitas lahan dengan klasifikasi terbesar.

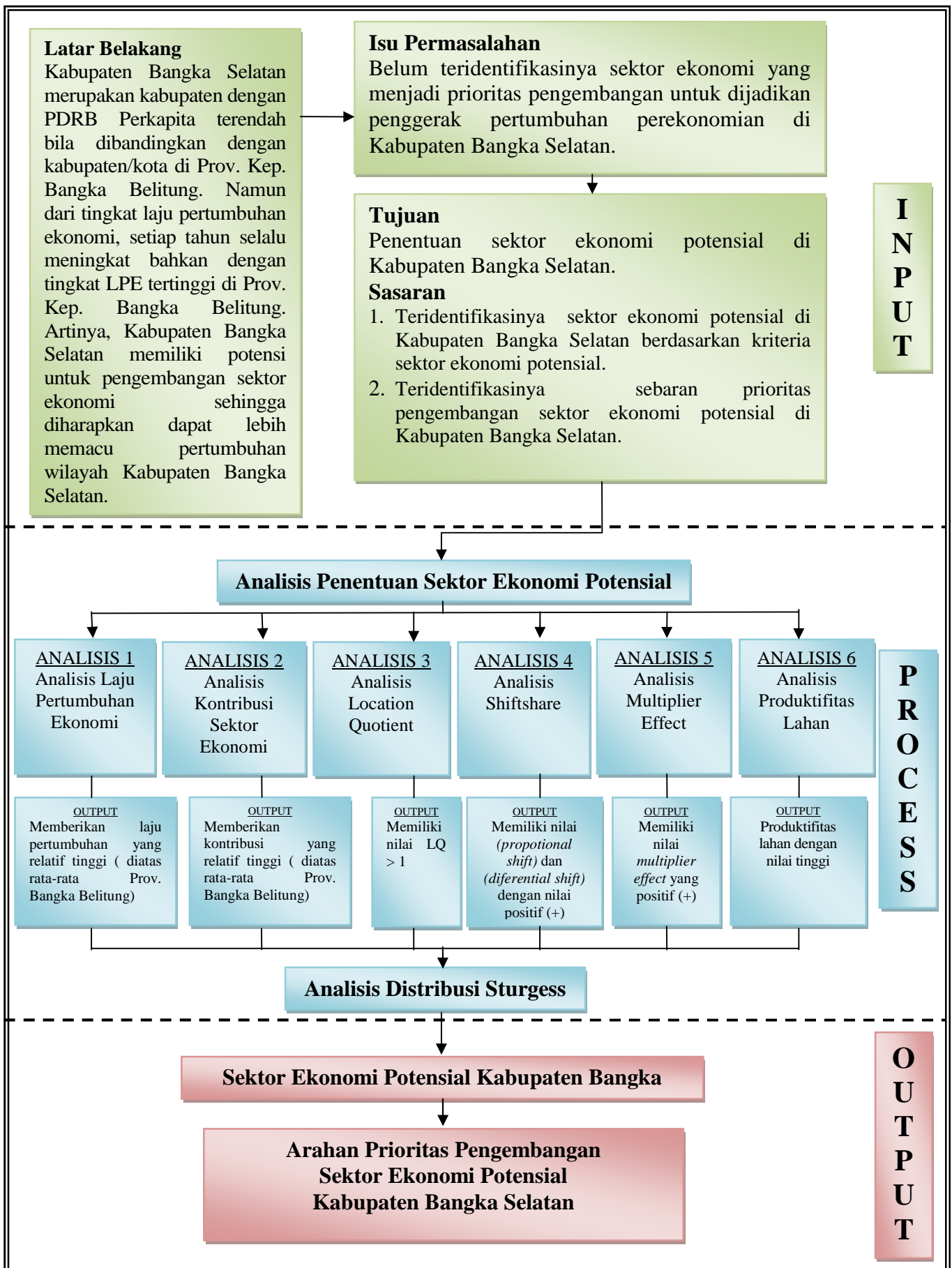
Dalam penelitian ini sektor ekonomi yang akan diteliti dikelompokkan kedalam 9 sektor ekonomi. Adapun ke 9 sektor yang akan diteliti tersebut diantaranya:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan
9. Jasa - Jasa

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah memahami permasalahan dalam penelitian, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang dapat menjelaskan tahapan/ langkah-langkah dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran, dapat dilihat pada **Gambar 1.2**

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



1.6 Metodologi

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data pada studi ini dilakukan dengan dua tahap yaitu perolehan data primer dan perolehan data sekunder. Pada tahap perolehan data primer dilakukan dengan cara mencari data pokok pada setiap instansi yang terkait, sedangkan perolehan data sekunder dilakukan dengan cara memperoleh bahan-bahan atau kajian literatur yang sesuai dengan topik pembahasan studi, hal ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu acuan serta dapat memperkuat dalam pengerjaan studi ini.

Selanjutnya dari data yang telah diperoleh dalam kedua tahap tersebut dilakukan analisis melalui pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif yang dapat saling menunjang dalam mencapai tujuan serta sasaran studi.

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah berupa analisis kualitatif, yaitu analisis berdasarkan pada logika dilapangan, yang bersifat deskripsi dan analisis berupa analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang disajikan dalam bentuk deretan angka atau tabel. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penulisan studi ini yaitu analisis laju pertumbuhan ekonomi, analisis kontribusi, analisis *location quotient*, metode *shift share*, metode *multiplier effect*, dan produktifitas lahan yang akan dijelaskan dibawah ini.

1) Struktur Ekonomi/Kontribusi Sektor Ekonomi

Struktur perekonomian atau lebih dikenal kontribusi sektor ekonomi merupakan komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka dapat diketahui pula sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian. Selain itu dapat dilihat juga apakah terjadi pergeseran struktur ekonomi atau tidak.

Untuk menentukan sektor ekonomi potensial parameter yang dilihat adalah melihat berapa besar kontribusi yang diberikan suatu sektor terhadap PDRB wilayah (melihat pada distribusi persentase PDRB).

Besarnya persentase masing-masing sub sektor/sektor diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB sub sektor atau sektor dengan nilai total PDRB, dikali 100%. (Sumber: *Diklat Metode Analisis Perencanaan II*).

Rumus :

$$D_{(n,i)} = \frac{NTB_{(n,b,i)}}{PDRB_{(n,b)}} \times 100\%$$

Keterangan :

D = distribusi persentase

n = tahun berlaku

i = sektor

b = a.d.h. berlaku

NTB = Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja/aktivitas dari berbagai sektor ekonomi menghasilkan pendapatan/nilai tambah masyarakat pada suatu periode tertentu.

Untuk mengetahui fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, digunakan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pembangunan yang dilaksanakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain perkembangan baru terjadi jika jumlah barang secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (**Arsyad: 1999**)

Laju pertumbuhan ekonomi ini disebut juga indeks berantai, baik harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan adalah LPE harga konstan karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor. Data LPE sangat banyak digunakan dalam

evaluasi dan untuk menyusun strategi pembangunan terutama di daerah-daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi ini disebut juga indeks berantai, baik harga berlaku maupun harga konstan. Pada umumnya yang sering digunakan adalah LPE harga konstan karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor. Data LPE sangat banyak digunakan dalam evaluasi dan untuk menyusun strategi pembangunan terutama di daerah-daerah. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan cara membagi nilai sektor atau subsektor PDRB tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikurangi satu, dikalikan 100%.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{(PDRB_{t+1}) - (PDRB_t)}{(PDRB_t)} \times 100 \%$$

3) Location Quotient (LQ)

Model analisis Location Quotient (LQ) merupakan model analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah atau kota dalam sektor kegiatan tertentu. Location Quotient (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/ industry tersebut secara nasional (**Robinson Tarigan : 2005**).

Model ini pada dasarnya menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor pada suatu wilayah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Model pendekatan ini memiliki manfaat yaitu untuk mengetahui penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sesuai dengan pola permintaan di tingkat yang lebih tinggi di atasnya dan permintaan daerah akan suatu barang pertama – tama di penuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan jika jumlah yang di minta melebihi jumlah produksi daerah tersebut maka kekurangannya akan dilakukan import ke dalam daerah tersebut. Model perhitungan analisis tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{x_i/PDRB}{X_i/PNB}$$

Keterangan :

x_i = Nilai tambah sektor i di suatu daerah

PDRB = Produk domestik regional bruto daerah tersebut

X_i = Nilai tambah sektor i secara nasional

PNB = Produk nasional bruto atau GNP

Kriteria penggolongan Location Quotient (LQ) adalah sebagai berikut:

- $LQ > 1$; artinya sektor tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga memberikan peluang untuk mengekspor kewilayah lain, atau sektor tersebut memiliki suplai input-output yang lebih besar dari kebutuhan lokal sehingga mempunyai potensi ekspor.
- $LQ = 1$; artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut mampu menentukan permintaan input-output dalam wilayah sendiri dapat dikatakan wilayah tersebut dalam kondisi perekonomian seimbang.
- $LQ < 1$; sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri, atau sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan input-output wilayahnya sendiri sehingga untuk memenuhinya dibutuhkan impor.

Apabila $LQ > 1$ artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional, sebaliknya apabila $LQ < 1$ maka peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional.

$LQ > 1$ menunjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut dan sering kali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah atau efisien. Atas dasar itu $LQ > 1$ secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa

daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor yang dimaksud.

Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi atau bantuan khusus oleh daerah yang bersangkutan melebihi yang diberikan daerah-daerah lainnya.

4) Analisis Shiftshare

Analisis shift-share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift-share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel (**Robinson Tarigan : 2005**).

Analisis Shift-Share adalah analisis yang membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di wilayah lokal dengan wilayah nasional. Analisis Shift Share juga mampu melihat seberapa besar kontribusi tambahan lapangan kerja dan laju pertumbuhan spesialisasi sektor industri pada suatu wilayah lokal terhadap wilayah nasional. Pertambahan lapangan kerja (employment) regional total dapat diurai menjadi komponen shift dan komponen share. Beberapa komponen analisis yang diperhatikan dalam analisis Shift-Share antara lain :

1. Komponen Nasional Share (Ns)

Banyaknya pertambahan lapangan kerja lokal seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode studi. Model perhitungan analisis tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Ns = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n}$$

Keterangan :

Ns : National Share

E : Employment atau banyaknya lapangan kerja

r : Region atau wilayah analisis

i : sektor

t : tahun

t-n : tahun awal

N : National atau wilayah yang lebih tinggi jenjangannya

Komponen shift adalah penyimpangan (deviation) dari national share dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat/ merosot dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, shift itu dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D).

Proportional Shift Component (P) kadang-kadang dikenal sebagai komponen struktural atau industrial mix, mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor sektor yang secara nasional tumbuh dengan lambat atau bahkan edang merosot.

Differential Shift component (D) kadang-kadang dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah/ efisien, akan mempunyai differential shift component yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

2. Komponen Proportional Share (P)

Komponen share sering pula disebut *komponen national share*. *Komponen national share (Ns)* adalah banyaknya pertambahan lapangan pekerjaan regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertambahan nasional selama periode studi. Hal ini dapat dipakai sebagai kriteria lanjutan bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen ini melihat pengaruh sektor-I secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor-i pada region yang dianalisis. Model perhitungan analisis tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$P = E_{r,i,t-n} (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - E_{N,t} / E_{N,t-n}$$

Keterangan :

- P : Proportional Share
- E : Employment atau banyaknya lapangan kerja
- r : Region atau wilayah analisis
- i : sektor
- t : tahun
- t-n : tahun awal
- N : National atau wilayah yang lebih tinggi jenjangannya

3. Komponen Differential Shift (D)

Komponen ini melihat perkembangan sektor-sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di tingkat lokal daripada tingkat nasional yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor lokasional intern seperti sumber daya yang melimpah/efisien. Model perhitungan analisis tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D = E_{r,i,t} - E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n} (E_{r,i,t-n})$$

Keterangan :

- D : Differential Shift
 E : Employment atau banyaknya lapangan kerja
 r : Region atau wilayah analisis
 i : sektor
 t : tahun
 t-n : tahun awal
 N : National atau wilayah yang lebih tinggi jenjangannya

Model *analisis Shift-Share* ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$SSA = NS + D + P$$

Keterangan :

- SSA = Shift-share analysis
 NS = National Share
 D = Differential Shift
 P = Proportional Share

5) Multiplier Effect

Teori multiplier regional yang dikemukakan oleh John Glasson (1987) menerangkan saling berkaitan antara sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah serta kekuatan-kekuatan pendorong salah satu sektor ke sektor yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung adalah teori basis ekonomi (**Jhon Glasson,1987**).

Menurut John Glasson, perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Kegiatan-kegiatan basis (basic activities) adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya keluar daerah. Sedangkan kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis (non basic activities) adalah usaha ekonomi

yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan saja. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerahnya. Oleh karena itu, ruang lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal (**Jhon Glasson ,1987**).

Menurut teori ini meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi basis di dalam suatu daerah, akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah itu dan akan mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi bukan basis (effect multiplier). Sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, akan berakibat berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan selanjutnya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh kegiatan bukan basis. (**Paul Sitohang, 1977:77**).

Dampak pengganda suatu sektor dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{E_{si}}{E_{bi}}$$

Dimana r merupakan efek pengganda (multiplier effect), E_{si} adalah aktivitas sektor non basis, dan E_{bi} merupakan aktivitas sektor basis. Aktivitas sektor basis dirumuskan sebagai berikut :

$$E_{bi} = E_{iR} - [E_{iN} / E_N] E_R$$

Sedangkan untuk menghitung aktivitas non basis digunakan rumus sebagai berikut :

$$E_{si} = E_{iR} - E_{bi}$$

Keterangan:

E_{iR} : Produksi sektor i di daerah kajian

- E_R : Produksi seluruhnya (Total Produksi) di daerah kajian
- E_{iN} : Produksi sektor i di seluruh daerah lebih luas dimana daerah kajian menjadi bagiannya
- E_{iR} : Produksi Seluruhnya (Total Produksi) di seluruh daerah yang lebih luas dimana daerah kajian menjadi bagiannya

6) Produktifitas Lahan

Produktifitas lahan merupakan perbandingan antara nilai produksi sektor dengan luas penggunaan lahan eksisting sektor tersebut. Semakin tinggi nilai produktivitas lahan tersebut maka semakin tinggi pula tingkat keproduktifan penggunaan lahan sehingga sektor tersebut layak untuk di kembangkan.

$$\text{Produktifitas Lahan} = \frac{\text{nilai produksi sektor}}{\text{luas lahan sektor eksisting}}$$

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penyajian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang kajian penelitian yang ditinjau dari tinjauan teori – teori yang ada atau kajian pustaka yang berkaitan dengan ekonomi wilayah.

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pembahasan bab ini berisikan mengenai uraian tinjauan terhadap gambaran umum wilayah yang terbagi menjadi kebijakan pengembangan regional, gambaran umum Kabupaten Bangka Selatan, dan karakteristik perekonomian Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV ANALISIS SEKTOR EKONOMI POTENSIAL KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pada bab ini diuraikan tentang analisis penentuan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan analisis laju pertumbuhan ekonomi, analisis struktur/kontribusi ekonomi, analisis *location quetion* (LQ), analisis *shiftshare*, analisis *multifier effect* dan analisis produktivitas lahan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil kajian seluruh bab dan memperoleh output yang berupa suatu saran kepada pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai masukan atau rekomendasi terhadap pengembangan wilayah tersebut.